

Bab II

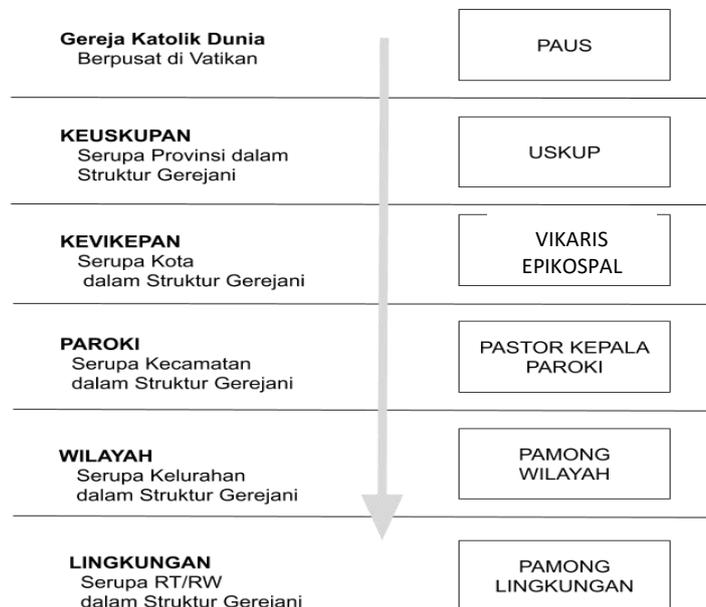
Gambaran Umum

2.1. Gereja Katolik

2.1.1 Struktur Hierarki dan Teritori Gereja Katolik

Gereja sering kali diartikan secara sempit sebagai gedung atau tempat peribadatan. Secara etimologis, gereja berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ekklesia*” yang artinya perkumpulan⁴⁶. Gereja sendiri kemudian memiliki arti sebagai perkumpulan umat yang percaya kepada pewartaan Yesus Kristus. Gereja Katolik merupakan lembaga agama yang menaungi seluruh umat Katolik di dunia. Sebagai lembaga agama, Gereja Katolik memiliki hirarkie dan teritori terstruktur dari tingkat dunia hingga ke teritori administratif terkecil. Susunan hirarkie dan teritori Gereja Katolik, tergambaran di bawah

ini.



Gambar 2.1. Struktur Teritori dan Pemimpin Gereja Katolik
sumber : Kitab Hukum Kanonik, Bagian II, Buku II

⁴⁶ Tim Penyusun, “*Katekismus Gereja Katolik*”, Konsili Vatikan II, 1962, hlm. 128.

Pada gambar di atas, dapat kita lihat susunan Gereja Katolik secara hirarkie di sisi sebelah kanan, terdiri dari Paus, Uskup, dan Imam. Sementara susunan teritori Gereja Katolik dapat dilihat disisi sebelah kiri.

Teritori Gereja Katolik terbesar yaitu tingkat dunia, berpusat di Vatikan. Gereja Katolik dunia dipimpin oleh seorang Imam dengan gelar Paus. Sebagai pimpinan Katolik dunia, Paus dibantu oleh Imam dengan gelar Kardinal. Dalam hal ini, Kardinal tidak masuk dalam struktur hirarkie dan tidak bertugas memimpin suatu teritori. Meskipun tidak memimpin suatu teritori administratif dan tidak masuk dalam hirakie Gereja, Kardinal memiliki tugas menjadi penasihat Paus. Seorang imam akan diangkat sebagai Paus setelah melalui suate skema pemilihan yang dilaksanakan oleh para Kardinal, sesaat setelah Paus sebelumnya meninggal dunia.

Secara hierarki, di bawah Paus terdapat Imam dengan gelar Uskup. Seorang Uskup bertugas menjadi pemimpin yang teritori Gereja yang disebut Keuskupan. Bila diibaratkn wilayah negara, Keuskupan bisa dibilang serupa dengan provinsi dalam struktur teritori gereja. Dalam Keuskupan akan terbagi lagi menjadi beberapa tingkatan teritori, Di bawah Keuskupan ada teritori yang disebut dengan Kevikepan, dipimpin oleh seorang Imam dengan gelar Vikaris Episkopal. Bila Kevikepan diibaratkan setingkat Kota dalam struktur teritori gereja, maka teritori yang serupa kecamatan dalam Gereja Katolik disebut dengan Paroki. Paroki akan dipimpin oleh seorang Pastor Kepala Paroki yang dibantu beberapa Imam lainnya di suatu komunitas imam paroki.

Tiap tiap paroki akan terbagi menjadi beberapa teritori yang disebut 'Wilayah'.

Pada tingkat teritori 'Wilayah' ini, seorang pimpinan yang disebut Pamong Wilayah. Seorang pamong wilayah berasal dari umat awam. 'Wilayah' merupakan gabungan dari beberapa lingkup yang paling kecil dalam struktur teritori Gereja Katolik, yaitu 'lingkungan' Sama seperti 'Wilayah', tingkatan teritori 'Lingkungan' dipimpin pula oleh seorang awam yang disebut dengan 'pamong lingkungan'. Dalam teritori 'lingkungan' terdiri dari beberapa keluarga beragama katolik yang tinggal berdekatan.

Indonesia sendiri, terdiri dari 37 keuskupan. Seluruh Uskup yang ada di Indonesia, kemudian membentuk suatu federasi yang kemudian di sebut dengan Konferensi Wali Gereja. Anggota dari Konferensi Wali Gereja merupakan Uskup-Uskup yang masih aktif bertugas. Konferensi Wali Gereja merupakan forum kerja sama antar Uskup, dan setiap Uskup tetap memiliki hak otonomnya⁴⁷. Berdasarkan website KWI, Gereja di Indonesia terbagi menjadi 6 regio, meliputi regio Sumatera, Jawa, Kalimantan, Manado Ambonia Makasar, Nusa Tenggara, dan regio Papua⁴⁸. Dari 37 Keuskupan yang ada di Indonesia, 10 diantaranya merupakan keuskupan agung. Keuskupan agung dengan Uskup Agungnya memiliki tugas menjadi penghubung keuskupan-keuskupan sekitarnya. 10 Keuskupan Agung tersebut, meliputi :

⁴⁷ Tim Penulis KWI, "Tentang KWI", <http://www.kawali.org/profil-kwi/>, diakses 30 Mei 2019

⁴⁸ Tim Penulis KWI, "Keuskupan", www.kawali.org/keusk, diakses 30 Mei 2019

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Keuskupan Agung Medan | 6. Keuskupan Agung Samarinda |
| 2. Keuskupan Agung Palembang | 7. Keuskupan Agung Makasar |
| 3. Keuskupan Agung Jakarta | 8. Keuskupan Agung Ende |
| 4. Keuskupan Agung Semarang | 9. Keuskupan Agung Kupang |
| 5. Keuskupan Agung Pontianak | 10. Keuskupan Agung Merauke. |

Dalam penelitian ini, akan mengambil Keuskupan Agung Semarang sebagai fokus lokasi penelitian.

2.1.2. Keuskupan Agung Semarang

Keuskupan Agung Semarang (KAS) merupakan suatu keuskupan yang teritorinya mencakup dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Teritori KAS di Provinsi Jawa Tengah meliputi Jawa Tengah bagian Timur, kecuali Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora. Sementara itu di sebelah barat, Kabupaten yang masuk teritori KAS meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang. Selain Provinsi Jawa Tengah, teritori KAS mencakup seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas teritori Keuskupan Agung Semarang sekitar 19.022,5 km², kemudian terbagi menjadi empat kevikapan, meliputi⁴⁹

1. Kevikepan Kedu/Magelang
2. Kevikepan Semarang
3. Kevikepan Surakarta

⁴⁹ Tim Penulis, "Profil Singkat KAS", www.kas.or.id/profil-singkat, diakses 29 Mei 2019

4. Kevikepan Yogyakarta

Dari empat kevikepan tersebut, tiga diantaranya berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Menurut data Konferensi Wali Gereja, tercatat total 102 Paroki dari empat kevikepan di teritori Keuskupan Agung Semarang.



Gambar 2.2. Teritori Keuskupan Agung Semarang

Sumber : kas.or.id, Diakses 28 Mei 2019

2.1.3. Pimpinan dan pembantu pimpinan Keuskupan Agung Semarang

Keuskupan Agung Semarang dipimpin oleh seorang Uskup, yaitu Mgr. Roberus Rubiyatmoko. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Mgr. Robertus Rubiyatmoko, dibantu oleh seorang Imam dengan gelar Vikaris Jendral, yaitu Pastor Yohanes Rasul Edy Purwanto Pr. Selain itu, Uskup Semarang juga dibantu oleh 4 Imam Vikaris Episkopal, untuk menjadi pemimpin dan melayani umat di masing-masing Kevikepan. Keempat orang Imam Vikaris Episkopal tersebut meliputi;

- Pastor Antonius Budi Wihandono Pr, Vikaris Episkopal Semarang
- Pastor Robertus Budiharyana Pr, Vikaris Episkopal Surakarta
- Pastor Alexius Dwi Ariyanto Pr, Vikaris Episkopal Kedu/Magelang
- Pastor Adrianus Maradiyo Pr, Vikaris Episkopal Yogyakarta

Dalam kepengurusan Keuskupan Agung Semarang, terdapat bula Komisi-komisi yang bertanggung jawab mengurus bidang masing-masing. Tiap-tiap komisi memiliki seorang imam moderator sebagai ketua, pendamping, ataupun penasihat. Adapun Komisi komisi tadi, meliputi :

- | | |
|---|--|
| a. Komisi Liturgi | h. Komisi Komunikasi Sosial |
| b. Komisi Kitab Suci | i. Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi |
| c. Komisi Kateketik | j. Komisi Kerasulan Mahasiswa |
| d. Komisi Keluarga | k. Komisi Kepemudaan |
| e. Komisi Karya Misioner | l. Komisi Pendidikan |
| f. Komisi Perdamaian, Keadilan dan Keutuhan Ciptaan | m. Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan |

g. Penghubung Karya

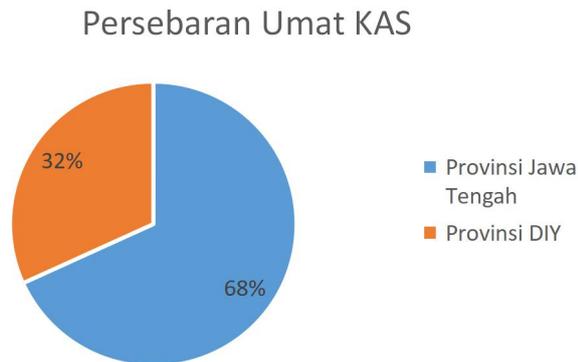
Kerasulan Kemasyarakatan

Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang (PK4AS) merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh KAS untuk menjadi penghubung dan penggerak karya kategorial umat di bidang sosial-politik-kemasyarakatan.⁵⁰ Dalam menjalankan fungsinya, PK4AS,

⁵⁰ Vincent Suriadinata, *Op.cit*

dimoderatori oleh Pastor Raymundus Sugihartanto, yang sekaligus menjadi Ketua PK4AS sejak tahun 2008 hingga sekarang

2.1.4. Umat Keuskupan Agung Semarang



Grafik 2.1. Persebaran Umat KAS
sumber : bps.go.id, diakses 20 November 2019

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 jumlah umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang sebanyak 531.788 orang. Sekitar 362,625 orang atau sebesar 68,2% persen berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sementara di Provinsi DIY terdapat umat Katolik sebanyak. 169.153 jiwa (31,8%). Banyak kegiatan pengembangan iman yang dilakukan umat Katolik, khususnya pada tingkat Paroki. Masing-masing paroki memiliki kegiatan Pendidikan Iman Anak dan Pendidikan Iman Remaja, yang bertujuan pendidikan iman dan pengenalan kitab suci sejak dini. Selain itu, orang muda yang ada di setiap paroki tergabung dalam kelompok Muda-mudi Katolik atau yang akrab disebut Mudika.

Selain kegiatan pengembangan iman di Paroki, terdapat berbagai organisasi masyarakat Katolik yang bergerak di bidangnya masing-masing. Beberapa Ormas Katolik tersebut antara lain, Persatuan Mahasiswa Katolik

Republik Indonesia (PMKRI), dan Ikatan Sarjana Katolik Republik Indonesia.

A. Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia

PMKRI merupakan ormas beranggotakan mahasiswa katolik yang memiliki minat pada isu-isu bidang sosial politik kebangsaan. Ormas yang terbentuk pada 1947 ini, saat ini memiliki beberapa perwakilan daerah⁵¹. Dilihat pada wilayah Keuskupan Agung Semarang sendiri, terdapat dua pimpinan daerah PMKRI yang aktif yaitu PMKRI Semarang dan PMKRI Yogyakarta.

B. Pemuda Katolik

Pemuda Katolik merupakan organisasi kemasyarakatan yang berdiri pada 15 November 1945. Berusia hampir sama dengan Republik ini, Pemuda Katolik memiliki struktur organisasi yang tertata dari pusat hingga kedaerah-daerah. Saat ini terdapat sepuluh koordinator wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai organisasi berbasis agama, Pemuda Katolik memiliki visi menjadi organisasi pengkader yang menysar ke anak muda katolik, supaya menjadi pribadi yang handal dalam berkiprah untuk Gereja dan Tanah Air. Hal ini sesuai dengan slogan yang sering digaungkan Pemuda Katolik, "*Pro Ecclesia et Patria*", yang artinya untuk Tanah Air dan Gereja.

⁵¹ Tim Penulis. "Sejarah PMKRI", <https://pustaka.pmkri.id/2015/05/sejarah/>, diakses 18 November 2019

2.2. Gereja Katolik dan Politik

2.2.1 Definisi Politik Menurut Gereja Katolik

Secara umum, dalam dokumen *Gaudium et Spes* disebutkan bahwa Gereja memandang penting politik sebagai suatu hak dan kewajiban umat Katolik sebagai warga negara. Peneliti merasa perlu untuk lebih mendalami bagaimana Gereja Katolik memandang politik khususnya di lingkup Keuskupan Agung Semarang, oleh karena itu peneliti menemui informan 1, Pastor Raymundus Sugihartanto, selaku Ketua Komisi Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang (PK4AS), informan menyampaikan bahwa Gereja Katolik memandang politik sebagai suatu proses yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama⁵². Pernyataan ini kemudian dipertegas dengan keterangan dari Pastor YR Edy Purwanto, pr, selaku Vikaris jenderal Keuskupan Agung Semarang. Vikaris Jenderal secara sederhana dapat diartikan sebagai wakil Uskup (pemimpin keuskupan), dalam *Kitab Hukum Kanonik nomor Kan.475* dijelaskan bahwasanya Vikaris Jenderal diberi kuasa berdasarkan jabatan untuk membantu Uskup memimpin seluruh Keuskupan. Berdasar keterangan yang didapat melalui wawancara dengan Pastor Edy, Gereja Katolik memandang politik sebagai upaya

⁵² Wawancara dengan Ketua PK4AS, Pastor Raymundus Sugihartanta tanggal 19 Maret 2020

mewujudkan kesejahteraan umum dan mewujudkan kebaikan umum atau dalam bahasa latin disebut “*Bonum Commune, Bonum Publicum*”.⁵³ Pastor Edy, yang juga pernah menjabat sebagai Sekertaris Eksekutif Konferensi Wali Gereja, menegaskan bahwa Gereja Katolik memandang politik sebagai suatu yang mulia dan luhur karena tujuannya tersebut.

2.2.2 Dasar Ajaran Gereja Katolik mengenai Politik

Berangkat dari definisi mengenai politik tersebut, peneliti mencari lebih jauh dasar-dasar ajaran Gereja Katolik mengenai politik. Dari studi literatur yang dilakukan peneliti, ada beberapa dokumen yang menjadi dasar ajaran Gereja Katolik itu sendiri mengenai politik. Salah satu dokumen tersebut adalah *Gaudium Et Spes* yang merupakan dokumen hasil Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II merupakan pertemuan seluruh uskup di dunia yang dilaksanakan tahun 1962-1964. Dalam dokumen tersebut, dibahas mengenai pandangan dan posisi Gereja dalam masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik. *Gaudium Et Spes* nomor 75 menyatakan,

Maka Hendaknya semua warganegara menyadari hak maupun kewajibannya untuk secara bebas menggunakan hak suara mereka guna meningkatkan kesejahteraan umum. Gereja memandang layak dipuji dan dihormati kegiatan mereka, yang demi pengabdian kepada sesama membaktikan kepada kesejahteraan negara dan sanggup memikul beban kewajiban mereka.⁵⁴

Dalam kutipan tersebut, Gereja secara tegas menyatakan perlunya menggunakan hak suara guna meningkatkan Kesejahteraan umum. Tidak hanya mendorong umat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga

⁵³ Wawancara dengan Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, Pastor YR Edy Purwanto tanggal 28 April 2020

⁵⁴ Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, Vatican City, 1965, no.75

negara, Gereja Katolik juga secara tegas menolak kekuasaan politik yang diktatorial,

Tetapi adalah bertentangan dengan kemanusiaan, bila kekuasaan politik jatuh ke dalam bentuk-bentuk totaliter atau diktatorial, sehingga melanggar hak-hak pribadi maupun kelompok kelompok sosial.⁵⁵

Selain dalam dokumen *Gaudium et Spes*, peneliti menemukan pula Gereja Katolik mengeluarkan dokumen-dokumen Gereja berupa nota pastoral maupun surat gembala yang didalamnya menyinggung tentang politik. Surat Gembala Prapaskah 1997, berjudul “*Keprihatinan dan Harapan*” merupakan salah satu surat gembala yang secara tegas menyatakan sikap politik Gereja pada masa orde baru. Bahkan, dalam surat gembala tersebut Gereja berani mengkritik orde baru dan mengeluarkan ‘fatwa’ tidak memilih tidak berdosa. Setelah surat gembala tersebut, secara rutin Gereja Katolik melalui otoritas lokal mengeluarkan surat gembala yang didalamnya menyinggung politik.

Temuan-temuan dari studi literatur ini, diperkuat dengan keterangan dari Pastor Edy yang menyampaikan dasar ajaran gereja dapat dibedakan menjadi dua katagori, yaitu dasar teologis (kitab suci) dan dasar magisterium (ajaran) Gereja. Pastor Edy menyampaikan beberapa dasar teologis diantaranya, dari Kitab Yeremia Bab 29 ayat 7, dituliskan disana, “*Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu*”. Tentu ini sejalan dengan definisi *Bonum Commune* dan *Bonum Publicum* yang diajarkan Gereja Katolik, di mana umat diajak turut terlibat dalam mengusahakan

⁵⁵ Konsili Vatikan II, *ibid.*

kesejahteraan tersebut. Tidak hanya itu, informan juga menyampaikan dalam kitab lainnya, yaitu Kitab Matius bab 22 ayat 21, disana dituliskan, "*Jawab mereka: "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah."*" Menurut informan, hal ini menunjukkan bahwa umat Katolik harus seimbang antara kewajibannya sebagai umat Allah dan warga negara. Dalam konteks hubungan agama dan politik ini, Pastor Edy menambahkan bahwasannya agama dan politik tidak bisa dipisahkan, namun harus dibedakan. Harus dibedakan, dalam artian ketika individu berperan sebagai umat Katolik maka harus menjalankan hak dan kewajibannya sebagai umat, namun ketika individu berperan sebagai warganegara maka wajib taat terhadap aturan warga negara. Sementara itu maksud kalimat "tidak bisa dipisahkan", karena baik agama dan politik dilaksanakan dan dihayati oleh individu yang sama.

Di samping dasar ajaran telogis, Pastor Edy menyampaikan secara magisterium selain surat gembala, ada beberapa dokumen yang secara jelas membahas tentang politik. Dalam *Dekrit Kerasulan Awam Konsili Vatikan II*, nomor 14 dituliskan secara jelas,

Dalam berbakti kepada bangsa dan dalam menunaikan tugas-tugas kewarganegaraan dengan setia, umat Katolik hendaknya menyadari kewajibannya untuk memajukan kesejahteraan umum yang sejati. Hendaknya mereka berusaha berpengaruh dengan bobot pandangan mereka, sehingga pemerintahan dijalankan dengan adil, dan hukum-hukum selaras dengan tuntutan-tuntutan moral serta menunjang kesejahteraan umum. Hendaknya orang-orang katolik, yang mahir dibidang politik, dan sebagaimana wajarnya berdiri teguh dalam iman serta ajaran kristiani, jangan menolak untuk menjalankan

urusan-urusan umum. Sebab dengan jasa-jasa mereka yang pantas dihargai itu mereka dapat mendukung kesejahteraan umum, dan sekaligus merintis jalan bagi Injil.⁵⁶

Dalam kutipan dokumen tersebut, Gereja Katolik kembali menekankan kewajiban kewarganegaraan yang kemudian ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, selaras dengan tuntutan moral. Bahkan, Gereja mendorong secara langsung untuk partisipasi politik umat utamanya, utamanya yang mahir dibidang politik, supaya menjadi berpengaruh sehingga pemerintah dijalankan dengan adil. informan lainnya, Pastor Raymundus Sugihartanta menambahkan secara magisterium, Gereja Katolik juga mengeluarkan buku Ajaran Sosial Gereja, yang kemudian menjadi pedoman bagi Gereja sebagai lembaga dan umat untuk ikut terlibat dalam kehidupan sosial politik.

Dari adanya dua sumber ajaran gereja tentang politik, menunjukkan adanya keselarasan dengan konsep *Homo Religiosus* dari Mircea Eliade di mana pengalaman dan penghayatan akan yang suci kemudian mempengaruhi corak serta kehidupannya⁵⁷. Terlihat bahwa ajaran iman dari kitab suci yang mana menjadi dasar teologis, berpengaruh terhadap corak kehidupan gereja yang kemudian dituangkan oleh gereja, dalam hal ini hierarki Lembaga Gereja yang berisi para imam, kedalam dokumen-dokumen Gereja turunan seperti surat gembala, arah dasar keuskupan, hingga dokumen-dokumen konsili.

⁵⁶ Konsili Vatikan II, *Apostolicam Actuositatem*, Vatican City, 1965, nomor 14

⁵⁷ A Sudrajat, *Agama dan Perilaku Politik*. Jurnal Humanika: UPT MKU-UNY 2002, hlm 1

2.2.3. Pandangan umat Katolik terhadap Politik

Berbagai ajaran gereja yang telah disampaikan kedua informan di atas, mendorong peneliti untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan umat awam Katolik terhadap politik. Peneliti menemui beberapa organisasi masyarakat Katolik, yang berisi umat awam dan memiliki perhatian dan bergerak di bidang sosial politik, serta sering berdinamika secara langsung dengan umat Katolik, baik dalam sosialisasi, diskusi, maupun pendidikan politik. Gabrielle Adeline, Ketua Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Semarang, menyatakan bahwasannya banyak umat Katolik yang masih tertutup mengenai politik. Pernyataan ini kemudian didukung oleh pernyataan dari Kristian Hardianto, Ketua Vox Point Jawa Tengah, yang menyatakan,

Secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok mas. Kelompok pertama, jumlahnya cukup sedikit yaitu mereka yang sadar dan tertarik terhadap politik. Kelompok kedua, ini adalah kelompok yang buta tentang politik dan Kelompok ketiga, yang jumlahnya cukup banyak, itu mereka yang anti dengan bahasan politik, dalam artian tidak ingin sama sekali mendiskusikan politik, terlebih di lingkungan Gereja.⁵⁸

Keadaan ini, tidak disangkal oleh Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang. Data yang dikumpulkan oleh komisi PK4AS, dari 103 Paroki yang ada di Keuskupan Agung Semarang, masih ada dua paroki yang menyatakan diri sebagai zona bebas politik. Ketika dimintai keterangan mengenai hal ini, Pastor Edy, selaku Vikaris Jenderal menyampaikan bahwa masih banyak umat yang memandang politik sebagai suatu yang negatif. Kepada peneliti,

⁵⁸ Wawancara dengan Ketua VoxPoint Jawa Tengah, Kristian Hadianto tanggal 12 April 2020

Pastor Edy menyampaikan hal tersebut terjadi karena umat memahami politik semata-mata dari dinamika politik yang terjadi tidak dari pemahaman ajaran gereja. Pastor Edy menyampaikan,

Kebanyakan umat masih memandang politik sejauh dipraktekkan oleh para politisi, maka masih banyak melihat negatif, di mana politik dipandang hanya tentang mengejar dan mempertahankan kekuasaan. Gereja mau membawa umat dalam pemahaman yang benar seturut ajaran Gereja, maka perlu adanya pendidikan politik.⁵⁹

Asmika Rahman dalam Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, menyampaikan:

Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor mata pencarian. Jika salah satu dari kelima faktor tersebut dapat berperan aktif dalam masyarakat, maka akan mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap politik⁶⁰

Dari keterangan Pastor Edy, di mana umat Katolik yang memandang negatif politik, melihat dan memahami politik dari dinamika praktik politisi, kita dapat lihat bahwa faktor lingkungan sangat berpengaruh sehingga mempengaruhi pemahaman masyarakat itu sendiri. Dalam keterangan itu, Pastor Edy juga menambahkan perlunya pendidikan politik, ditinjau secara teoritis hal ini sesuai dengan teori pendidikan politik dari Alfian. Dalam bukunya, Alfian menguraikan arti pendidikan politik yang lebih dalam yakni pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak

⁵⁹ Wawancara dengan Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, Pastor YR Edy Purwanto, 28 April 2020

⁶⁰ Asmika Rahman, *Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10, Juni 2018, hlm 45

dibangun⁶¹. Selaras dengan teori itu, pendidikan politik hendak dilakukan gereja agar umat memahami nilai-nilai politik yang ideal dibangun sesuai ajaran gereja.

2.2.4. Posisi dan Peran Gereja dalam Politik

Peneliti mencoba melakukan pendalaman tentang bagaimana posisi Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang (KAS) dan sejauh apa Gereja Katolik KAS mengambil peran dalam politik. Dari studi pustaka yang peneliti lakukan, dalam dokumen *Gaudium et Spes* nomor 76, disebutkan bahwa Gereja turut ambil bagian mengembangkan kebebasan politik para warganegara. Ketika ditanya mengenai posisi KAS dalam politik, Pastor Edy menegaskan bahwa gereja mengambil peran Memberdayakan umat dalam kehidupan kemasyarakatannya mendorong dan terus menguatkan umat untuk terlibat di ruang publik kemasyarakatan di mana mereka dipanggil mewujudkan kesejahteraan umum dan kebaikan umum tadi. Sementara itu, Pastor Sugihartanta melengkapi keterangan tersebut dengan menyampaikan bahwa gereja menjalankan tiga peran,

Gereja menjalankan 3 peran, yaitu Kenabian, Imam, dan Penggembalaan. Peran kenabian akan menjelaskan politik secara teologis, di mana kita perlu memberikan apa yang menjalankan kewajiban sebagai warga negara dan warga gereja, seperti frase dalam injil ‘berikan yang menjadi hak allah dan kepada kaisar yang menjadi hak kaisar’. Lalu peran imam, berarti gereja memandang bahwa keterlibatan politik merupakan perwujudan iman. Artinya keterlibatan gereja untuk mendorong umat masuk terlibat dalam politik sebagai suatu perwujudan iman dan demi lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Serta, memberikan *batasan* batasan moral dan dosa..seperti tindakan money politic, hoax. Sebagai gembala gereja mengarahkan umatnya agar paham

⁶¹ Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Publik di Indonesia*, Jakarta : Pt. Gramedia. 1990, hlm.245-246

kewajiban berbangsa dan bernegara. Gereja mengajarkan tentang kehidupan berbangsa, khususnya dalam pemilu, Gereja turut mempersiapkan individu untuk ikut kontestasi maupun menjadi penyelenggara dan pengawas.⁶²

Pastor Sugi dalam keterangannya menyampaikan bahwa gereja turut mempersiapkan umat sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu. Peneliti kemudian menghubungi lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu, untuk mengetahui seberapa jauh peran Lembaga Agama diharapkan dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu. Komisioner KPU Jawa Tengah, Diana Ariyanti, menyampaikan

Lembaga agama diharapkan menyampaikan pesan-pesan pemilu damai, termasuk Gereja Katolik juga misalnya melalui surat-surat dari pastor itu. Selain itu lembaga agama diharapkan dapat mengambil peran dalam proses pendidikan pemilih.⁶³

Sementara itu, Roffiudin, Komisioner Bawaslu Jawa Tengah menilai lembaga agama dapat mengambil peran mendorong spirit dalam pengawasan pemilu. Saat memberi keterangan, informan menyampaikan,

Lembaga agama menjadi salah satu segmen yang ikut terlibat pengawasan, di mana agamawan bisa jadi patokan ditengah masyarakat dan dapat mengambil peran untuk mendorong spirit agama terkait pengawasan itu sendiri. misalnya tentang pelanggaran money politik, hoax, nah pandangan dan pesan agama tentang fenomena tadi diharapkan dapat membawa pemilu yang lebih bersih⁶⁴

Peneliti hendak memperluas lagi informasi mengenai peran Gereja Katolik KAS dalam politik, maka peneliti mencoba mencari perspektif dari umat Katolik. PMKRI Semarang melalui ketuanya, menyatakan Gereja

⁶² Wawancara dengan Ketua PK4AS, Pastor Raymundus Sugihartanta, tanggal 19 Maret 2020

⁶³ Wawancara dengan Komisioner KPU Jawa Tengah, Diana Ariyanti, tanggal 10 Maret 2020

⁶⁴ Wawancara dengan Komisioner Bawaslu Jawa Tengah, Roffiudin, tanggal 22 April 2020

gencar mendorong umat untuk masuk ke politik, berbagai kaderisasi juga gencar dilaksanakan. Menurutnya, Gereja tahu umatnya tertutup dengan politik, maka melalui berbagai upaya diharapkan mendorong umat *aware* ke politik. Hal serupa juga diungkapkan oleh Antonius Binawan, seorang awam Katolik yang pada Pemilu 2019 lalu mengikuti kontestasi legislatif DPRD Kota Semarang, Gereja dinilai sudah mulai mengambil peran dalam pendidikan politik, namun menurutnya Gereja Katolik cukup terlambat dalam mengambil peran ini,

Jujur saja Gereja agak terlambat untuk mendidik umatnya, namun memang akhir-akhir ini sudah bisa terlihat ada upaya itu, misalnya ketika melalui menjelang adven ada materi diskusi tentang politik. Catatan penting hierarki harus tetap netral.⁶⁵

Sementara itu, sedikit berbeda dengan PMKRI dan Antonius Binawan, Ormas VoxPoint, melalui ketuanya menyatakan peran gereja masih terbatas di bidang elektoral, di mana umat didorong untuk memilih dan dipilih, menurut VoxPoint gereja memberi ruang tapi belum mempersiapkan secara matang.

2.3. Partisipasi Politik di Keuskupan Agung Semarang

Keterlibatan Gereja Katolik dalam membangun bangsa telah terjadi sejak awal masa kemerdekaan. Tokoh-tokoh katolik banyak yang turut terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Slogan “*100% Indonesia, 100% Katolik*” yang diucapkan oleh pahlawan nasional sekaligus orang Indonesia pertama yang menjadi Uskup, Mgr. Soegijopranata, menggambarkan dorongan besar agar Gereja dan umat Katolik keseluruhan terlibat dalam upaya membangun

⁶⁵ Wawancara dengan umat Katolik, Antonius Binawan, tanggal 28 April 2020

bangsa. Pada bagian ini, peneliti hendak melihat lebih jauh bagaimana keterlibatan Gereja Katolik dan umat Katolik dalam Politik

2.3.1. Peran Gereja dalam Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu konvensional dengan berbagai kegiatan elektoral dan nonelektoral, serta partisipasi politik nonkonvensional, seperti demonstrasi atau kudeta. Dalam penelitian ini, partisipasi politik yang akan dibahas adalah kelompok partisipasi konvensional

Seperti yang telah sedikit diulas di atas, dapat dipahami partisipasi politik konvensional, tidak hanya dalam bentuk *electoral activity* saja, namun juga berbagai kegiatan lain untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, peneliti mencoba mencari informasi mendalam peran Gereja Katolik dalam partisipasi politik baik dalam bentuk *electoral activity* maupun kegiatan *non-electoral*.

2.3.1.1 Peran Gereja dalam Partisipasi Politik *Electoral Activity*

Dari perspektif umat, salah satu organisasi kemasyarakatan Katolik, yaitu Pemuda Katolik melihat Gereja sangat mendukung proses pemilihan umum, di mana salah satu kewajiban gereja adalah untuk mencerdaskan umatnya. Pemuda Katolik menilai peran gereja disini sebagai pendamping umat, dalam upaya mencerdaskan umat dalam bidang perpolitikan, salah satunya dengan melaksanakan *voters education*. Pemuda Katolik menyampaikan bahwa penting untuk Gereja mencerahkan umat memilih calon-calon wakil dan pemimpin yang baik

dan ideal, dengan penekanan sebatas mencerahkan tidak mengarahkan memilih pihak manapun. PMKRI juga menilai Gereja gencar mempersiapkan umatnya dengan melakukan berbagai kaderisasi, bahkan didalamnya turut menggandeng Ormas Katolik untuk melakukan pendidikan politik dan mendorong umat berpartisipasi. Misalnya Pemuda Katolik di mana sebagai lembaga mengambil peran menjadi lembaga pemantau pemilu dan kadernya banyak yang ikut dalam kontestasi. Ormas Katolik lainnya, VoxPoint, bersama Gereja Katolik melakukan pendidikan politik berkeliling, dan dalam pemilu VoxPoint menentukan sikap dengan tidak memobilisasi massa ke calon tertentu, namun turut memberikan kisi-kisi pemimpin atau wakil yang seperti apa yang baik untuk dipilih.

Pastor Sugi memberikan keterangan selaras dengan yang disampaikan oleh beberapa kelompok umat Katolik tersebut. Informan menyampaikan, pada dasarnya Gereja tidak mengarahkan untuk memilih siapa, namun gereja akan membantu umatnya dalam hal pencerdasan, memberi poin-poin dan melakukan bedah calon dengan fokus membahas *track record* dan visi misi. Pastor Sugi menambahkan bila perlu, Gereja akan mengundang ahli dan pengamat politik serta tokoh lintas agama untuk bersama melakukan bedah kandidat. Tidak hanya itu, Gereja juga turut mempersiapkan umat yang hendak maju dalam kontestasi pencalonan, dengan pembekalan kepada calon-calon tersebut. Selain dalam kontestasi pencalonan, Pastor Sugi juga

menambahkan Gereja berupaya mendorong umat terlibat dalam kelompok penyelenggara ditingkat apapun serta menjadi kelompok pengawas. Bicara tentang pengawasan, Bawaslu Jawa Tengah menekankan pentingnya pengawasan partisipatif, di mana pemilu merupakan agenda bersama sehingga semua unsur publik diajak untuk terlibat, tidak hanya untuk memilih, namun untuk pengawasan pula. Perangkat Bawaslu tentu terbatas, oleh karena itu peran partisipatif masyarakat diperlukan untuk ikut mengawasi hingga ke lingkup paling kecil. Dalam hal pengawasan, data yang dimiliki PK4AS menunjukkan, umat yang telah mengikuti kaderisasi dan pembekalan angkatan kedua, 75% wanita yang hadir masuk dalam kelompok pengawas di berbagai tingkat.

2.3.1.2 Peran Gereja dalam Partisipasi Politik *Non-Electoral*

Partisipasi politik non-elektoral, dalam hal ini *policy making*, Pastor Sugi menyatakan Gereja sudah dilibatkan pada isu-isu dan kampanye kerukunan antar agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama. Selain itu, Gereja sebagai lembaga agama seringkali dilibatkan dalam perumusan kebijakan untuk menanggulangi berbagai masalah sosial, seperti radikalisme, narkoba hingga pergaulan bebas. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari Pastor Edy yang menyatakan Gereja dilibatkan dalam isu kerukunan. Pastor Edy menambahkan, dalam perumusan peraturan daerah mengenai isu umum, meskipun Gereja belum dilibatkan secara langsung, Gereja tetap mengambil peran

melalui ormas-ormas Katolik maupun bukan Katolik serta LSM lainnya yang mengadvokasi isu tertentu dalam rumusan kebijakan tertentu. Sementara itu, pada tingkat nasional Gereja Katolik melalui KWI telah memiliki peran dengan memberikan rekomendasi, tanggapan, dan masukan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah maupun proses pembuatan produk politik. VoxPoint sebagai salah satu ormas katolik, memiliki pandangan di mana Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang, belum memiliki peran signifikan utamanya dalam pengawalan kebijakan pemerintah. Melihat realitas ini, VoxPoint kemudian mengambil peran sebagai *pressure group*. untuk turut mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah serta memberikan rekomendasi-rekomendasi. Tidak hanya VoxPoint, PMKRI juga menempatkan diri sebagai *pressure group*, untuk mengawal kebijakan pemerintah, dan menempatkan diri menjadi wakil suara Gereja. Sementara itu Pemuda Katolik, juga mengambil peran dalam hal mengawasi jalannya pembangunan di daerah masing-masing melalui organisasi cabang mereka di tingkat Kabupaten/Kota.

2.3.2. Partisipasi Politik umat Katolik

Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang menyampaikan bahwa partisipasi politik umat Katolik sudah cukup baik namun bisa dibilang belum optimal. Bila dilihat secara umum, menurut informan sudah ada umat Katolik yang terlibat dalam ruang publik, kehadirannya sebagai birokrasi, politisi, maupun organisasi masyarakat/ Namun, bila dilihat dari segi jumlah dari

seluruh umat Katolik, tentu bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Pastor Edy menyampaikan,

Tentu perlu ditingkatkan dengan harapan sebanyak-banyaknya orang katolik terlibat d ruang publik.. baik legislatif, eksekutif, ASN, NGO yang memperjuangkan hak politik warga masyarakat. Kalaupun pun tidak ikut dalam kontestasi, sadar tanggung jawab. juga mendukung kontestasi dengan menjadi voters bertanggungjawab, sekaligus pemilih yang kemudian mau mengawal calonnya yang terpilih.⁶⁶

Pastor Sugi, yang menjadi ketua PK4AS, komisi yang membawahi bidang politik di Keuskupan Agung Semarang, menyampaikan bahwa telah terjadi perkembangan minat dan partisipasi politik umat Keuskupan Agung Semarang,

Kalau dilihat perkembangannya, dulu awal saya mengurus PK4AS tahun 2008 umat sangat antipati, namun sekarang mulai ada progres yang baik minimal kemauan untuk mendengarkan dan menyoblos. Keterlibatan praktis memang sedikit, namun untuk pada tingkat penyelenggara di KPPS maupun PPS itu sudah banyak, dan juga banyak yang mulai ikut caleg.⁶⁷

Pendapat dari Pastor Sugi tersebut didukung oleh keterangan dari PMKRI, yang menyatakan setidaknya saat ini ada peningkatan di mana, kaum muda sudah mulai peduli pada isu politik. Namun, lebih jauh lagi PMKRI mengharapkan lebih banyak umat Katolik yang semakin melek politik bahkan ikut terjun masuk dalam perpolitikan. Keterangan Pastor Sugi mengenai jumlah umat yang ikut dalam kontestasi legislatif, didukung dengan data dari

⁶⁶ Wawancara dengan Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, Pastor YR Edy Purwanto, tanggal 28 April 2020

⁶⁷ Wawancara dengan Ketua PK4AS, Pastor Raymundus Sugihartanta, 19 Maret 2020

organisasi masyarakat Pemuda Katolik. Ormas Pemuda Katolik, menilai partisipasi mengalami peningkatan luar biasa, terutama dalam Pemilu 2019,

Dilihat dalam Pemilu kemarin sangat luar biasa, untuk umat Keuskupan Agung Semarang yang ikut kontestasi ada, lebih dari 300 orang, dan untuk umat katolik di keseluruhan wilayah Jawa Tengah ada hampir 500 orang yang ikut kontestasi pemilihan legislatif.⁶⁸

Dilihat dari keterangan beberapa informan di atas, adanya kecenderungan Gereja Katolik memaknai partisipasi politik dan mendorong umat hanya pada kegiatan pemilihan saja. Hal ini didukung pernyataan dari VoxPoint, yang menyampaikan Gereja Katolik memfokuskan partisipasi umat hanya pada *electoral activity* saja, sementara partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ataupun pengawalan kebijakan dinilai belum ada. Senada dengan VoxPoint, Antonius Binawan juga menyatakan bahwa partisipasi umat Katolik secara umum saat ini hanya sebatas pada kegiatan pemilihan menjadi *voters* saja. Sementara itu, ormas Katolik, sebagai bagian dari umat Katolik, melakukan partisipasi dalam berbagai bentuk lain. Pemuda Katolik misalnya rutin menggelar diskusi mengenai isu-isu yang sedang berkembang. Sementara itu, Vox Point dan PMKRI misalnya, disampaikan dalam interview kedua ormas Katolik ini tidak hanya melakukan diskusi-diskusi politik, namun juga melakukan advokasi dan memberikan masukan-masukan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

⁶⁸ Wawancara dengan Ketua Ormas Pemuda Katolik Jawa Tengah, Stephanus Agus, tanggal 21 April 2020

2.3.3. Hambatan Partisipasi Politik umat Katolik

Dari survei pendahuluan yang peneliti lakukan dengan interview kepada Pastor Sugi, telah ditemukan beberapa hambatan untuk mendorong partisipasi politik umat Katolik, diantaranya rendahnya kesadaran politik, pandangan bahwa politik dan agama adalah hal yang tabu untuk berjalan bersama, serta perasaan sebagai minoritas yang tidak signifikan suaranya. Dari perspektif umat, ormas katolik yang peneliti temui, seluruhnya menyuarakan hal yang sama, di mana kesadaran politik umat Katolik masih sangat rendah. VoxPoint bahkan menyebut masih ada umat yang anti bahasan tentang politik, Antonius Binawan juga menambahkan rendahnya kesadaran politik ini menurutnya karena umat belum paham dan mengerti arti penting keterlibatan dalam politik. Selain itu, selaras dengan yang dinyatakan Pastor Sugi, Antonius Binawan menyebut perasaan sebagai minoritas turut menghambat umat Katolik untuk mau terjun terlibat dalam politik. PMKRI juga melihat hal ini, di mana dalam analisis mereka perasaan sebagai minoritas yang kecil suaranya, menyebabkan keengganan untuk terjun dalam politik. Sementara itu Pastor Edy, mengelompokkan adanya 2 jenis hambatan yaitu yang berasal dari Internal Gereja dan Eksternal Gereja.

Dalam internal Gereja, meliputi umat dan imam dalam Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang. Terdapat 2 hambatan internal menurut pengamatan Pastor Edy, yang pertama adalah pemahaman umat yang keliru akan politik, di mana terjadi bias karena melihat dinamika politik yang tidak baik sehingga menurunkan minat dan kesadaran politik umat. Kedua, belum

seluruh imam khususnya di Keuskupan Agung Semarang yang memiliki pemahaman sama tentang pentingnya memberdayakan umat di bidang politik. Menurut keterangan Pastor Edy, banyak imam yang belum sepaham mengenai pentingnya mendorong umat untuk memiliki pemahaman politik yang benar dan pentingnya mendorong keterlibatan umat dalam bidang politik. Sementara untuk hambatan eksternal menurut Pastor Edy adalah munculnya kelompok-kelompok primordial yang membawa politik sektarian, menjadikan umat minder dahulu sebelum terjun ke politik.

Hambatan internal yang disampaikan Pastor Edy, ternyata juga dirasakan oleh VoxPoint, di mana sebagai ormas katolik, VoxPoint merasa kesulitan menemukan imam yang memiliki minat dalam hal politik. Terkait hal tersebut, Pastor Sugi menyampaikan, kondisi ini terjadi karena dalam pendidikan imam, tidak ada pendidikan wajib dalam bidang politik, namun pendidikan politik menjadi seminar konsentrasi pilihan ketika persiapan menjadi imam. Pastor Sugi juga menambahkan bila dari kongregasi Imam (kelompok imam), tentu pendidikan persiapan akan disesuaikan dengan fokus dari kelompok imam tersebut. Semisal dari Kongregasi *Missionariorum a Sacra Familia*, yang fokus dalam pembinaan keluarga Katolik, maka pendidikan persiapan imam akan ditujukan ke sana. Pastor Sugi mencontohkan dengan kelompok imam lainnya,

Kongregasi lainnya misalnya dari Ordo Serikat Yesus, mungkin akan lebih beragam karena fokus dari kelompok tersebut adalah perutusan diberbagai bidang salah satunya pengelolaan pendidikan, sehingga para Pastor disiapkan untuk menjadi pengelola yayasan atau menjadi dosen. Meskipun tidak dalam bidang politik, namun mereka tentu secara luas bisa memberi

kontribusi keterlibatan bagi pembangunan bangsa pada bidang mereka masing-masing.⁶⁹

Tertarik untuk mendapatkan informasi lebih luas, peneliti mencoba menghubungi seorang Imam yang juga menjadi akademisi. Pastor Bernardus Rukyanto, SJ, merupakan pastor dari kelompok imam Serikat Yesus yang di samping menjadi imam beliau juga berprofesi sebagai seorang dosen Teologi. Pastor Ruky menyampaikan sebagai dosen teologi, ia tetap bisa berkontribusi dalam pencerdasan dalam bidang politik,

Saya dalam pendidikan teologi sebagai dosen tetap bisa berperan dalam pencerdasan bidang politik, di mana saya dalam pengajaran memasukan pendidikan katakese kebangsaan. Tentu tujuannya menyadarkan mahasiswa untuk ikut terlibat membangun bangsa.⁷⁰

Selain itu, sebagai akademisi Pastor Ruky juga pernah menulis suatu Jurnal berjudul *Peran Gereja Katolik dalam Membangun Bangsa di Era Reformasi*, dalam jurnal tersebut informan mencermati tantangan-tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia di bidang sosial, politik, dan ekonomi dari Kacamata Uskup-uskup Gereja Katolik Indonesia. Ketika diminta pendapat mengenai hambatan partisipasi politik umat Katolik saat ini, informan menyampaikan bahwa perasaan tidak tertarik kepada politik dan perasaan sebagai minoritas yang menjadi penghambat umat Katolik untuk terlibat dan bergerak dalam politik.

⁶⁹ Wawancara dengan Ketua PK4AS, Pastor Raymundus Sugihartanta, tanggal 19 Maret 2020

⁷⁰ Wawancara dengan Pastor dan Akademisi, Pastor Bernardus Rukyanto, SJ, tanggal 29 April 2020